

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pada tatanan kelembagaan pemerintah yang berlaku terutama di lingkungan Departemen Pekerjaan umum, pelaksanaan tugas pembangunandiwadahi dalam suatu organisasi tertentu sesuaidengan karakteristiknya. Penyelenggaraan tugas pokok dilaksanakan unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal, dan Badan-badan, sedangkan tugas-tugas yang bersifat teknis baik teknis penunjangmaupun teknisoperasional dilaksanakan oleh unit organisasi yaitu UnitPelaksanateknis (UPT) atau yang disebut dengan nama Balai.

Balai diatur dan diarahkan agar terwujudnyaUPT yangprofesional, responsive,adaaktif, inovatifdan memiliki kemandiriandalam pengelolaannya. Balai Besar WilayahSungai(BBWS) Mesuji Sekampung merupakan suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Pekerjaan Umum yangadadiPropinsiLampung. Berdirinya Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor7 Tahun 2004. Visi dari Balai BesarWilayah Sungai MesujiSekampung adalah Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya air yang adil, merata dan berkelanjutan,serta berperanaktifdalam upayamensukseskan program ketahanan pangan nasional,hingga tercapainya kondisi masyarakat yang adil, makmur,aman dan damai.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda

pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai negara yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga atau satker serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pengendalian terhadap APBN pada pemerintah dan pagu anggaran atau Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) pada suatu kementerian atau lembaga menjadi perhatian penting supaya dalam pengawasan APBN dan pagu anggaran/DIPA dapat berjalan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dalam merealisasikan tujuan tersebut dengan cara menerapkan sebuah sistem akuntansi dalam kementerian atau lembaga pemerintahan agar dapat mengoptimalkan biaya operasional yang dikeluarkan dan

dapat mengefektifkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Salah satunya menggunakan sistem pembayaran yang biasanya digunakan dalam pembayaran pekerjaan atau jasa di pemerintahan, sistem ini disebut sistem pembayaran pembayaran langsung (LS).

Ini mencakup tentang cara pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah yang pembayarannya diwakilkan oleh bendahara untuk membayarkan kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintahan. Penerapan sistem pembayaran langsung pada kementerian atau lembaga pemerintah digunakan untuk membayar suatu kegiatan yang sudah dilakukan oleh instansi, pembayaran tersebut menggunakan uang tunai yang sebelumnya dicairkan lewat bank melalui cek yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dilihat dari sifatnya pembayaran langsung (LS) dapat disamakan dengan pembayaran tunai yang harus mendapat perhatian penting dalam pengendalian atau pelaksanaannya. Sebagai sistem pengendalian tersebut instansi membuat aturan dalam internal instansi, sebelum melakukan pembayaran langsung kegiatan atau pengadaan barang atau jasa tersebut harus diverifikasi dahulu kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang dijadikan dasar bendahara dalam melakukan pembayaran langsung. Selain untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang diperlukan agar dapat melakukan pembayaran, verifikasi juga bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kurang tertibnya administrasi pada pemerintahan.

Hal ini tentunya memberikan dampak positif terhadap kinerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, namun sekaligus dapat memberikan opini terhadap pengelolaan keuangan negara dalam instansi tersebut. Melalui penelitian ini menjadi informasi dan gambaran akan pentingnya

verifikasi pembayaran langsung (LS) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, instansi pemerintahan lainnya pada umumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menulis laporan Kerja Praktek dengan judul : “Analisis Verifikasi Pembayaran Langsung Dalam Surat Perintah Membayar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung sebagai salah satu instansi di wilayah Kota Bandar Lampung merupakan lokasi tujuan Kerja Praktek (KP) penulis.

## **1.2 RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA PRAKTEK**

Kerja praktek merupakan sarana latihan operasi dimana seseorang ditempatkan pada lingkungan sesungguhnya untuk mengembangkan keterampilan, sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menerapkan ilmu yang diperoleh dari lembaga pendidikan dan merealisasikan dalam pekerjaan.

Kerja praktek dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, terhitung dari 20 Agustus 2019 sampai dengan 19 September 2019 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Penulis melaksanakan Kerja Praktek (KP) atau Apprentice dibagian Surat Perintah Membayar. Tempat tersebut merupakan sub bagian dari Keuangan Daerah.

## **1.3 MANFAAT DAN TUJUAN**

### **1.3.1. Manfaat**

Penelitian ini dapat digunakan dan memberi manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

- Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
- Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, bersosialisasi dan menyelesaikan masalah.
- Sebagai sarana untuk menerapkan disiplin ilmu akuntansi yang telah diperoleh semasa kuliah dengan terjun langsung kedalam lingkungan kerja.

#### 2. Bagi Almamater

- Terjalinnnya kerjasama atau hubungan baik antara IIB DARMAJAYA dengan dinas/perusahaan tempat melaksanakan kerja praktek.
- Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan kreativitas dan keterampilan, serta kualitas sumber daya manusia pada umumnya.

#### 3. Bagi Tempat Kerja Praktek

- Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan kreativitas dan keterampilan, serta kualitas sumber daya manusia pada umumnya.
- Dapat memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan khususnya dalam pengarsipan agar lebih baik pelaksanaannya.

#### 4. Bagi Pembaca

- Sebagai bahan bacaan yang diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca.
- Sebagai referensi untuk penelitian dan pembuatan Laporan Kerja Praktek lainnya yang berkaitan dengan pengarsipan dokumen.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan diadakannya kegiatan Kerja Praktek (KP) adalah :

1. Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai akuntansi keuangan di Instansi Kementerian Negara.
2. Memperoleh data, keterangan-keterangan dan ilmu pengetahuan sehubungan dengan Keuangan Negara.
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai dunia pekerjaan.
4. Memperkenalkan penulis pada dunia kerja sehingga penulis memiliki persepsi, wawasan dan motivasi tinggi terhadap peranannya di masa depan.

### **1.4 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

#### **1.4.1 Waktu Pelaksanaan**

Kerja Praktek ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Agustus 2019 - 19 September 2019 dengan mengikuti waktu kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung setiap hari Senin - Jum'at yang dimulai pukul 08.00 - 16.30 WIB.

#### **1.4.2 Tempat Pelaksanaan**

Kerja Praktek ini dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji

Sekampung selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 57, Garuntang, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung 35401

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini tercantum latar belakang, ruang lingkup kerja, tujuan dan manfaat program apprentice, tempat dan waktu pelaksanaan program apprentice, sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam bab ini tercantum sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha/kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan, dan struktur organisasi.

### **BAB III : PERMASALAHAN PERUSAHAAN**

Dalam bab ini menjelaskan analisa permasalahan yang terjadi di perusahaan, temuan masalah, perumusan masalah, serta kerangka pemecahan masalahnya.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan hasil dari analisis data, pengujian data serata pengujian hipotesis.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data dan saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**